

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, INDONESIA

Wellington L. Wenda

Kandidat Doktor Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih dan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Indonesia

Haedar Akib

Profesor Ilmu Administrasi dan Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang berusaha memacu pembangunannya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan capaian hasil pembangunan berbagai sektor di bidang ekonomi berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto, dengan menggunakan metode survei evaluatif. Teknik analisis yang digunakan adalah *Shift Share*. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa sektor kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan pengembangan daya saing Kabupaten Pegunungan Bintang. Sektor basis yang paling unggul dan memiliki prospek dalam pengembangan kompetensi lokal dan sebagai sumber keunggulan daya saing daerah di bidang ekonomi adalah sektor bangunan, kemudian disusul oleh sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa.

Kata Kunci: *Otonomi daerah, Pembangunan, Sektor Ekonomi*

PENDAHULUAN

Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai bidang dan sektor kegiatan. Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Secara normatif, esensi dan orientasi nilai dari upaya pemerintah ini didasarkan pada implementasi kebijakan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta undang-undang dan peraturan pemerintah pusat dan daerah secara sinergis dalam konteks desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah.

Urgensi dan signifikansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam era otonomi daerah didasarkan pada pandangan para pakar, seperti Tiebout (1956) dalam "*A Pure Theory of Local Expenditures*", Breton (1996) dalam "*Decentralization and Subsidiarity: Toward a Theoretical Reconciliation*", dan Abdulsalami (2007) dalam "*The Role of Public Administration in National Development Strategy*". Inti pandangan para pakar tersebut adalah

kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peran birokrasi di berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menurut Akib (2009), implementasi dan dampak kebijakan otonomi daerah ini sejatinya merupakan wahana efektif yang mampu memicu dan memacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara multi-dimensional, bukan sebaliknya.

Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah membawa dampak terhadap pertambahan jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah kabupaten dan kota hingga saat ini mencapai 336 dan jumlahnya mungkin akan bertambah (Hariadi, 2010: 72). Demikian pula kebijakan tersebut membawa dampak terhadap pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Hal ini dijelaskan dalam Media Informasi Otonomi Daerah Indonesia (2015) bahwa dampak otonomi daerah melahirkan begitu banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak otonomi daerah sangat luas, tidak hanya sekedar menciptakan perubahan pada aspek pemerintahan tetapi perubahan pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Khusus mengenai implementasi kebijakan program pembangunan pada bidang ekonomi selama ini didasarkan pada sembilan (9) indikator atau sektor sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaannya. Indikator atau sektor kegiatan tersebut terjabarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap daerah, yaitu: 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3) Sektor Industri Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Sektor Bangunan; 6) Sektor Perdagangan, Hotel

dan Restoran; 7) Sektor Angkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan 9) Sektor Jasa-jasa.

Pada kenyataannya, hasil capaian pembangunan berbagai sektor dalam bidang ekonomi tidak sama untuk setiap daerah di Indonesia. Khusus bagi daerah otonom baru masih banyak yang mengalami permasalahan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Presiden Republik Indonesia (Bapak Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono) beberapa tahun lalu bahwa 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru sehingga moratorium (penghentian pemekaran) akan dilanjutkan.

Menindaklanjuti pernyataan Presiden Republik Indonesia itu maka pada saat itu pula Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Gamawan Fauzi menyatakan bahwa 80 persen daerah otonom baru yang bermasalah adalah daerah yang baru dimekarkan nol sampai tiga tahun. Gamawan menambahkan bahwa masalah yang dihadapi daerah otonom baru umumnya disebabkan oleh pengalihan peralatan dokumen dan aset yang belum tuntas, kelengkapan yang tidak sempurna, dan kinerja yang tidak optimal (Pelita, 2015).

Tanpa menafikan permasalahan pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Indonesia saat ini, maka setiap daerah kabupaten atau kota, tidak terkecuali daerah otonom baru Kabupaten Pegunungan Bintang, berusaha menata dan mengarahkan pembangunannya pada berbagai bidang dan sektor kegiatan. Alasan ini mendasari mengapa studi tentang pembangunan ekonomi dalam konteks desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan pada lokus daerah otonomi baru di Indonesia.

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah otonom baru di Provinsi Papua yang dimekarkan pada tahun 2002. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pecahan atau hasil pemekaran

dari Kabupaten Jayawijaya (kabupaten induk), dimana dalam proses pembangunan daerahnya mengalami banyak kendala, seperti ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya, karena sektor-sektor dan kegiatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008 sampai 2011 mengalami penurunan yang signifikan (Badan Pusat Statistik, 2012). Kemudian, barulah pada tahun 2012 mengalami peningkatan, namun masih jauh dari yang diharapkan, sebagaimana kriteria hasil capaian pembangunan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah sebagai upaya pembangunan

Upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan dari setiap daerah salah satunya melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah dengan memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Dengan aturan tersebut, pemerintah di setiap daerah menindaklanjuti setiap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terbukti, bahwa banyak daerah di seluruh Indonesia melakukan sebuah pemekaran wilayah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, maka pembangunan disetiap daerah akan meningkat.

Terbukti dengan kebijakan perundang-undangan tersebut, Kabupaten Pegunungan Bintang adalah daerah pemekaran Kabupaten Jayawijaya yang melakukan pemekaran daerah yang dibentuk pada tanggal 21 November 2002 yang di bentuk berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2002. Namun pada tanggal 12 April 2003 baru diisahkan untuk dilakukan pembentukan. Berdasarkan aturan tersebut, maka daerah memiliki hal otonom seperti yang hak yang

dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia yang sering disebut adalah otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985).

Pembangunan Sektor Ekonomi

Peranan sektor ekonomi sebagai salah satu pondasi pembangunan daerah sangat menentukan keberhasilan bidang-bidang pembangunan yang digagas dan selanjutnya direalisasikan oleh pemerintah daerah. Karenanya, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, faktor penting yang harus menjadi fokus perhatian jajaran pemerintah daerah salah satunya adalah melalui upaya dibangunnya pemahaman sistem birokrasi yang sehat dan terencana program pembangunan ekonomi yang dinamis serta pro rakyat. (Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, 2012). Sebagai sebuah daerah otonom baru, harus meletakkan pondasi perekonomian yang menyeluruh dalam implementasi pembangunan daerah terkhusus daerah yang tertinggal. Akibatnya menjadi spirit bagi kemajuan disektor lainnya.

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya seperti tercermin dalam Produk Domestik suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan Harga Konstan. (BPS, 2012)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah survai evaluatif untuk menganalisis dan menjelaskan capaian hasil pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Data angka diperoleh secara langsung dari berbagai sumber resmi seperti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari dokumen yang disediakan oleh informan/responden (individu mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk data dan informasi yang diperoleh dari publikasi atau laporan penelitian dari dinas/instansi, serta dari sumber lain yang resmi dan terpercaya. Teknik analisis yang digunakan adalah *Shift Share*. Salah satu teknik analisis yang juga digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis pada setiap wilayah adalah teknik analisis *Location Quotient* yang meliputi tiga jenis analisis, yaitu pengukuran nilai: 1) *Localization Quotient (LQ)*, 2) *Localization Index (LI)*, dan 3) *Specialization Index (SI)*. (Lihat dalam laporan penelitian Akib dkk.: 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat merupakan cita-cita mulia setiap bangsa atau daerah, tidak terkecuali daerah otonom baru, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua (baca visi misi Kabupaten Pegunungan Bintang, 2012). Oleh karena itu, pemerintah daerahnya senantiasa berusaha mengayomi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara berbuat (bekerja) sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, agar cita-cita tersebut dapat dicapai. (Rangkuman hasil wawancara dengan informan). Untuk mewujudkan harapan tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah menggalakkan pembangunan di berbagai bidang dan sektor, termasuk pembangunan atau pengembangan berbagai sektor dan kegiatan di bidang ekonomi (Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang, 2012). Pengembangan sektor dan kegiatan yang menjadi pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dilihat hasil analisisnya dalam tabel 1, yaitu hasil analisis sektor basis.

Tabel 1 Penentuan Sektor Basis Menggunakan Analisis LQ di Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan Data PRDB Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	1,82	1,66	1,58	1,58	1,58
2. Pertambangan dan Galian	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
3. Industri dan Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Listrik, gas dan air bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bangunan	3,54	4,28	4,47	4,33	4,19
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,47	0,44	0,43	0,45	0,45
7. Angkutan dan Transportasi	0,62	0,86	0,79	0,76	0,69
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,31	0,30	0,29
9. Jasa-jasa	1,10	1,35	1,41	1,46	1,58

Sumber: Hasil Analisis Data, 2015

 = LQ > 1 □ Sektor Basis

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1, dapat dipahami secara rinci dan jelas mengenai sembilan sektor sebagai indikator pembangunan atau pengembangan bidang ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pegunungan Bintang, karena pada setiap tahun merupakan sektor unggulan, meskipun pada tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan, namun pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sektor basis ini masih stagnan, yaitu berada pada angka rasio 1,58. Sedangkan apabila dilihat dari jenis subsektornya yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terlihat bahwa hanya sektor kehutanan dan peternakan yang menunjukkan sektor unggulan, sedangkan lainnya jauh dari yang diharapkan.

Sektor Pertambangan dan Penggalan. Berdasarkan hasil analisis data *Localization Quotient (LQ)*, pada sektor ini belum menjadi sektor basis atau unggulan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Meskipun demikian, pada tahun 2011 dan 2012 pada subsektor penggalan, berdasarkan hasil analisis, termasuk dalam sektor basis atau unggulan.

Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Pengembangan bidang ekonomi pada sector-sektor ini merupakan sektor yang belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini disebabkan karena hasil analisis LQ yang dilakukan belum memiliki nilai, bahkan sektor industri pengolahan berada pada angka rasio 0.

Sektor Bangunan. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor bangunan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang tinggi, atau termasuk dalam kategori sektor basis atau unggulan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sektor tersebut mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bidang ekonomi daerah karena grafik trendnya menunjukkan peningkatan pada tahun 2008 sampai 2010, meskipun pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor Angkutan dan Komunikasi. Berdasarkan hasil analisis data LQ, sektor ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Meskipun demikian, pada subsektor lainnya, seperti subsektor angkutan udara sudah menunjukkan bukti sebagai sektor basis atau unggulan. Hal tersebut dapat terlihat dari data tahun 2008 sampai 2012 yang menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam jumlah penumpang.

Sektor Jasa-jasa. Sektor jasa memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Demikian pula subsektor pemerintahan umum telah dapat menunjukkan peningkatan kontribusi setiap tahun. Meskipun demikian, tidak semua subsektor jasa menjadi sektor basis atau unggulan.

Dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 sampai 2011 trendnya cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi, pada akhir tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8,36 persen dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012

Sesuai hasil analisis pembangunan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang maka sektor yang paling memberikan pengaruh adalah sektor bangunan, kemudian disusul sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya belum menunjukkan kontribusi yang cukup berarti. Sektor bangunan memberikan kontribusi yang berarti berupa peningkatan kuantitas sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan raya, perbaikan bandara udara, sarana pelayanan sektor publik, dan perbaikan infrastruktur dasar lainnya. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor basis atau sektor unggulan kedua karena daerah tersebut sebagian besar pegunungan dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini mendukung pengembangan sektor primer sebagai sektor basis atau unggulan yang menunjang pembangunan ekonominya. Selanjutnya, sektor jasa-jasa juga merupakan sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Subsektor yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pemerintahan umum, sedangkan sektor lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti karena daerah

tersebut merupakan daerah yang baru berkembang.

Pembahasan

Indikator pembangunan ekonomi yang menjadi perhatian dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah otonom baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan dan daya saing pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Papua dan di Kawasan Timur, bahkan di Indonesia. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki beragam potensi sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, namun berdasarkan hasil analisis data mengenai sektor basis pengembangan bidang ekonomi (tabel 1) dan ketika disandingkan dengan kabupaten lainnya Provinsi Papua dan di Indonesia, maka kondisi riil pengembangan sejumlah sektor dalam bidang ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang masih memprihatinkan.

Mengacu pada pandangan Tiebout (1956) dan Breton (1996) mengenai inti kebijakan desentralisasi sebagai wahana

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka dapat dinyatakan bahwa perlambatan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang bukan berarti orientasi nilai kebijakan desentralisasi tersebut tidak tepat, tetapi justru sebaliknya, arah dan tujuan desentralisasi pemerintahan telah mampu memberikan stimulasi dan arah kepada aparatur penyelenggara dan instansi terkait di daerah tersebut untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, pergeseran bandul penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi telah membuka ruang bagi daerah otonom baru, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang untuk berkreasi dan berinovasi di berbagai bidang dan sektor.

Menurut Huseini (1999) dan Akib (2003; 2008; 2014) yang menjelaskan pemikiran Prahalad dan Gary Hamel (2000) dalam bukunya *Competing for the Future* bahwa, kreativitas dan inovasi akan tumbuh dalam organisasi yang menganut perspektif strategi berbasis sumber daya (*resource-based perspective*). Perspektif strategi berbasis sumber daya merupakan salah satu perspektif strategi yang tepat diterapkan dalam upaya memacu pembangunan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua yang memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Perspektif strategi tersebut oleh Huseini dirangkum ke dalam model SAKA-SAKTI, atau satu kabupaten satu kompetensi inti dan sekarang mengikuti pola *one village one core competency* (Jepang).

Menurut Akib (2014), untuk daerah tertentu, upaya kreatif dapat dilakukan dengan memilih pendekatan *resource based* manakala hasil pemetaan kompetensi lokal yang dimiliki menunjukkan adanya produk atau

komoditas yang bisa dikreasi sebagai sumber keunggulan komparatif daerahnya. Di samping itu, pendekatan berbasis sumber daya relevan digunakan jika potensi dan kompetensi daerah menunjukkan kekhasan yang sulit ditiru oleh pihak atau daerah lain, sehingga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi daerah yang mengembangkan.

Baik Huseini maupun Akib memahami bahwa keefektifan manajemen organisasi dan atau daerah akan maksimal manakala strategi berbasis sumber daya tersebut dikombinasikan dengan perspektif strategis berbasis pasar (*market-based strategy*). Sedangkan Akib (2003), dalam tulisannya berjudul “Merambah Belantara Manajemen Pengetahuan” memperkenalkan perspektif Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) sebagai kombinasi dan sinergi pendekatan strategi berbasis sumber daya dengan pendekatan strategi berbasis pasar. Oleh karena itu, pengelolaan input (potensi dan kompetensi sumber daya), proses, produk (hasil) dan outcome sektor dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang yang belum optimal bukan saja disebabkan karena “kekurangcermatan” dalam memahami esensi dan orientasi nilai kebijakan ekonomi di era otonomi daerah, melainkan pula disebabkan karena belum optimal menerapkan pendekatan strategi (berbasis sumber daya dan berbasis pasar) dalam pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki, seiring dengan masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah tersebut.

Implikasi kebijakan lain yang terlihat dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua adalah penerapan kebijakan “desentralisasi asimetris” melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Disamping itu, “status” Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai

daerah otonom baru yang secara geografis jauh dari ibukota Provinsi Papua menyulitkan akses aparat pemerintah dan pelaku ekonomi untuk berkolaborasi dan berkreasi dalam mengembangkan dan memajukan kegiatan ekonomi daerahnya. Menurut Lloyd dkk (2012), kolaborasi dalam pembangunan diperlukan sebagai wujud perubahan pola pikir (*reframing*). Sedangkan menurut Normann (2001: 4), *reframing* yang dipadukan dengan rekonfigurasi merupakan perubahan model mental atau konsepsi mengenai seperti apa organisasi itu, apa yang akan dicapai, dan bagaimana cara mencapainya, atau upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan solusi kreatif yang ditawarkan. Menurut Scharmer (2009: 51), perubahan pola pikir merupakan level tiga dari model Teori U pembelajaran dan perubahan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di era otonomi daerah akan berhasil karena dilaksanakan secara kolaborasi sebagai wujud perubahan pola pikir dan perilaku aktornya.

PENUTUP

Implementasi kebijakan tentang pemerintahan daerah merupakan wahana efektif bagi setiap kabupaten kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, dalam membangun atau mengembangkan daerahnya. Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah ini juga merupakan esensi dan orientasi bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan bidang ekonomi, terutama dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto. Kontribusi yang diberikan adalah berupa pengembangan berbagai sektor basis atau sektor unggulan yang diharapkan mampu membangkitkan daya saing daerah. Sektor basis atau sektor unggulan yang menunjang pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sektor bangunan, kemudian sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi lainnya belum

menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama pihak swasta dan masyarakat agar menerapkan pendekatan strategis secara tepat dan berkolaborasi dalam memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi produktif yang kurang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerahnya. Disamping itu, tetap memperhatikan dan meningkatkan kualitas fungsi dan peran birokrasi lokal dalam pengelolaan sektor basis atau sektor unggulan daerahnya, sehingga sektor basis tersebut menjadi sumber keunggulan daya saing Kabupaten Pegunungan Bintang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalami, I. 2007. The Role of Public Administration in National Development Strategy: Challenges and Prospects. *NIM Journal*, 43 (2), pp. 30-33.
- Akib, Haedar. "Merambah Belantara Manajemen Pengetahuan", *Manajemen USAHAWAN Indonesia*, Nomor 4 Tahun XXXII, April 2003.
- Akib, Haedar, St. Hasbiah, Nippi Tambe, Maharuddin Pangewa. 2009. *Pengembangan Model Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Dasar Di Kawasan Ajatappareng Sulawesi Selatan*. Laporan Penelitian Strategis Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
- Akib, Haedar. "Snapshot Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Pengentasan Kemiskinan", *Manajemen USAHAWAN Indonesia*, Nomor 05 Tahun XXXVIII 2009, h. 4-8.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Produk Domestik Regional Bruto*

- Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012*. Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Breton, Albert. 1996. *Competitive Governments*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Geography_Contrast in Development. *Economic Development Indicators*, http://www.bbc.co.uk/schools/gcse/bitesize/geography/development/contrasts_development_rev3.shtml, diakses 26 Mei 2015.
- Hariadi, Pramono. 2010. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal Trikonomika* Volume 9, No. 2, Desember 2010, hal. 72–77.
- Huseini, Martani. 1999. *Mencermati Misteri Globalisasi*. Pidato Pengukuran Guru Besar Tetap Dalam Bidang Marketing Internasional, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kiser, Don. 1992. *A Location Quotient and Shift Share Analysis of Regional Economies in Texas*, Tesis Master of Public Administration. Department of Political Science Southwest Texas State University.
- Lloyd, Kate *et al.* “Reframing Development through Collaboration”, *Third World Quarterly*, Vol. 33, No. 6, 2012, pp. 1075-1094.
- Media Informasi Otonomi Daerah Indonesia. 2015. Otonomi Daerah. <http://otonomidaerah.com/dampak-otonomi-daerah/>, diakses 9 Mei 2015.
- Nathan. *Advanced users – Shift Share Analysis for calculating regional competitive advantage*, id the Population Experts, April 30, 2014, diakses 26 Mei 2015.
- Normann, Richard. 2001. *Reframing Business*, John Wiley and Sons Ltd, England.
- Pelita. 2015. “Bappenas: Perbaiki DOB Bermasalah”, *Harian Umum PELITA*, Edisi Sabtu, 09 Mei 2015. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=97295> diakses 9 Mei 2015.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 2012. Sektor Ekonomi Sebagai Penentu Keberhasilan Pembangunan (online) / http://www.tanahbumbukab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=606:sektor-ekonomi-penentu-keberhasilan-pembangunan-&catid=36:pemerintahan&Itemid=68 diakses 26 Mei 2015
- Scharmer, C Otto. 2009. *Theory U: Leading from the Future as It Emerges*, Berrett Koehler Publishers, Inc. San Francisco.
- Tiebout, Charles. 1956. “A Pure Theory of Local Expenditures”, *Journal of Political Economy*, 64 (5) pp. 416–24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.